



DPRD KOTA YOGYAKARTA

SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

PROGRAM TEPAT SASARAN, WARGA DIMUDAHKAN AKSES LAYANAN

Segera Realisasikan Sistem Satu Data Terintegrasi

YOGYA (KR) - Sistem satu data terintegrasi yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) diharapkan dapat segera direalisasikan. Melalui perangkat tersebut maka masyarakat selaku pengakses layanan akan dimudahkan serta program pembangunan yang digulirkan pemerintah pun bisa semakin tepat sasaran.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogya dari Fraksi Partai Golkar Nur Anita Owiwanti Putri MG, SP menjelaskan satu data terintegrasi sudah menjadi keniscayaan pada era perkembangan digital. "Sekarang mau akses kesehatan, pendidikan, perizinan dan lain-lain membutuhkan banyak persyaratan. Kartu yang digunakan juga bermacam-macam. Seharusnya bisa cukup dengan satu kartu saja jika sistem satu data sudah terintegrasi," tandasnya.

Ita, sapaan akrabnya mencontohkan ketika warga hendak melakukan pemeriksaan kesehatan harus menyiapkan berbagai kartu. Misalnya dari puskesmas berpindah ke fasilitas kesehatan lain pun seringkali harus dilakukan pemeriksaan administrasi lagi dari awal. Setiap rumah sakit juga menerbitkan kartu peserta sendiri-sendiri. Begitu pula untuk mengakses jaminan pendidikan minimal harus

Nur Anita Owiwanti Putri MG SP
Fraksi Partai Golkar

KR-Istimewa

tanya jangan hanya itu-itu saja. Kalau sudah pernah mengikuti, maka dalam data sudah tercantum sehingga tidak bisa doble. Sistemnya otomatis akan menutup akses agar bisa diganti yang lain sesuai sasaran," jelasnya.

Selain itu, SDM di tiap OPD juga harus bisa menyesuaikan. Setiap progres layanan harus langsung diupdate dalam sistem. Dengan begitu bagi warga yang tengah mengajukan layanan publik terutama perizinan maka pentahapannya bisa diketahui. Apalagi Kota Yogya juga telah memiliki aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sehingga akan lebih mudah dalam merealisasikan satu data terintegrasi.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogya, imbuh Ita, sebenarnya sudah menggagas sistem atau aplikasi tersebut. Hanya masih terkendala dengan teknis kebijakan di tiap OPD. "Seharusnya ego sektoral tiap OPD dikesampingkan dulu. Parameter layanan kan sudah cukup jelas. Jangan sampai kemudian kebijakan sendiri-sendiri. Satu data ini kan untuk kepentingan semua pihak. Seharusnya bisa segera direalisasikan sembari jika muncul persoalan teknis bisa dijadikan evaluasi," urainya. **(Dhi) f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005